



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama 1 (satu) Tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perhubungan merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1 (satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan aplikasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang Perhubungan.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat meningkatkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026 pada tahun-tahun berikutnya.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMBAS**



JALIL MUHAMMAD, S.H, M.H

NIP. 19661120 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	7
2.2 Analisis Kinerja Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.....	16
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi.....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaah Usulan Rogram dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	50
4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab. Sambas.....	50
4.2 Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Sambas	64
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	8
Tabel II. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2024	17
Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
Tabel II. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025.....	32
Tabel III. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	46
Tabel IV. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Tanggal 17 Oktober 2016. Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas merupakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan dan merealisasikan urusan tersebut diatas perlu penataan dengan membentuk suatu susunan organisasi dan kemudian melakukan pengisian struktural yang telah dibentuk, kemudian membutuhkan tenaga sumber daya aparatur yang profesional dan mampu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan profesinya dalam bidang tugasnya untuk mendukung tugas-tugas fungsional maupun operasional dan ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta dapat dimanfaatkan secara maksimal, untuk itu sangatlah diperlukan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta fasilitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas baik langsung maupun tidak langsung, karena kenyataannya masih banyak fasilitas perkantoran, sarana dan prasarana transportasi masih belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini,

diharapkan sektor Perhubungan di Kabupaten Sambas dapat beeran secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama disektor Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

- o. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
- t. Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah:

- a. Mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026.

- b. Mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Sambas dalam RKPD Tahun 2025
- 3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.4. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab. Sambas

4.2 Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Sambas

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Jumlah pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar 38.259.127.819 dengan realisasi belanja sebesar 30.012.333.074 atau sebesar 78,44 %.

Dalam penganggaran tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 Program dan 14 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)	
1	2	3	4	5			6			7	8
				K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	Meningkatnya ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100%	100	Persen	12.816.088.590.00	100	Persen	6,448,188,712.00	92%	5,920,268,450.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100%	100	Persen	190,422,574.00	100	Persen	146,176,001.00	89%	129,787,906.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Yang Tersedia 1 dokumen	1	dokumen	75,338,856.00	1	dokumen	45,054,523.00	85%	38,517,323.00

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang memadai selama 1 dokumen	1	dokumen	39,522,384.00	1	dokumen	28,284,627.00	71%	20,045,773.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang memadai selama 1 Dokumen	1	dokumen	40,693,316.00	1	dokumen	37,928,257.00	96%	36,316,216.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersedia 1 dokumen	1	laporan	34,868,018.00	1	laporan	34,908,594.00	100%	34,908,594.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100%	0	-	6,005,741,727.00	-	-	2,629,559,683.00	95%	2,510,677,767.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan Kab. Sambas 12 bulan	12	Bulan	5,575,398,297.00	40	Orang	2,386,323,172.00	95%	2,278,431,256.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD 12 bulan	12	Bulan	395,556,500.00	1	Dokumen	213,200,000.00	95%	202,210,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun selama 1 Dokumen	1	laporan	34,786,930.00	1	Laporan	30,036,511.00	100%	30,036,511.00
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	15,072,095.00			126,582,238.00	99%	125,517,238.00

		Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian barang milik daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian barang milik daerah SKPD	1	laporan	15,072,095.00	1	Laporan	126,582,238.00	99%	125,517,238.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100%	100	Persen	1,440,531,866.00	-	-	339,988,365.00	90%	305,803,101.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan	12	paket	31,856,280.00	1	Paket	20,439,364.00	100%	20,439,364.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlatan Rumah Tangga 12 bulan	12	Bulan	11,096,870.00	12	Bulan	20,765,095.00	100%	20,725,095.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK) selama 12 bulan	1	paket	233,362,894.00	1	Paket	55,193,899.00	172%	95,185,776.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan	1	paket	252,189,771.00	1	Paket	51,167,007.00	44%	22,621,719.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan selama 12 bulan	1	dokumen	73,615,000.00	1	Dokumen	24,180,000.00	100%	24,180,000.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan	1	laporan	838,411,051.00	1	Laporan	168,243,000.00	73%	122,651,147.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan barang milik daerah 100%	100	Persen	209,124,942.00	-	-	99,855,000.00	100%	99,855,000.00

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Penunjang Bangunan Bandara Liku Paloh 2 Paket	7	unit	134,329,942.00	-	unit	0.00	#DIV/0!	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Paket	2	paket	74,795,000.00	3	Unit	99,855,000.00	100%	99,855,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100%	100	Persen	2,525,067,462.00	-	-	1,831,491,245.00	90%	1,643,987,008.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediaanya Materai untuk Administrasi Perkantoran 12 bulan	1	Bulan	28,000,000	1	Laporan	7,308,125.00	100%	7,308,125.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, Ledeng dan Internet(Speedy) 12 bulan	1	Bulan	501,273,704.00	1	Laporan	187,766,600.00	84%	158,079,897.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Honor Pelayanan Umum Kantor 12 bulan	1	Bulan	1,995,793,758.00	1	Laporan	1,636,416,520.00	90%	1,478,598,986.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 100%	100	Persen	2,411,315,788.00	-	-	1,238,083,000.00	86%	1,058,662,250.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas 12 bulan	12	Bulan	349,522,500.00	4	Unit	112,924,000.00	86%	97,119,900.00

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemerliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan	12	Bulan	1,823,211,288.00	7	Unit	552,304,000.00	79%	439,063,350.00
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemerliharaan AC 12 bulan	12	Bulan	36,500,000.00	8	Unit	12,410,000.00	99%	12,285,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan	12	Bulan	174,022,000.00	2	Unit	556,175,000.00	91%	505,924,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Paket	1	Paket	28,060,000.00	2	Unit	4,270,000.00	100%	4,270,000.00
		Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 100%	100	Persen	33,884,231.00	-	-	36,453,180.00	100%	36,453,180.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen</i>	1	dokumen	33,884,231.00	1	dokumen	36,453,180.00	100%	36,453,180.00
2	Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi yang didukung ketersediaan sarana dan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Kabupaten 85%	85	Persen	82,105,453,459.00	-	-	29,150,071,002.00	72%	21,079,465,942.00
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun selama 1	7	dokumen	498,017,635.00	7	Dokumen	78,127,717.00	74%	58,092,540.00

	prasarana serta regulasi yang memadai		tahun sebanyak 7 dokumen perencanaan								
		Penyediaan Kelengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pemasangan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sambas 100%	100	Persen	79,863,566,515.00	-	-	28,059,958,785.00	72%	20,114,745,668.00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	Tersedianya Biaya Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) 12 Bulan	12	Bulan	67,020,643,159.00	3,000	unit	23,962,636,643.00	69%	16,572,184,269.00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan selama 12 bulan	12	Bulan	12,842,923,356.00	1,000	dokumen	4,097,322,142.00	86%	3,542,561,399.00
		Pengelola Terminal Tipe C	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Terminal Tipe C 100%	100	Persen	221,977,000.00	-	-	736,190,000.00	84%	621,815,150.00
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	Paket	221,977,000.00	1	unit	736,190,000.00	84%	621,815,150.00
		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pembangunan Lahan Parkir di Kab. Sambas 100%	100	Persen	-	-	-	150,503,475.00	99%	149,632,249.00

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan dan Pembangunan Lahan parkir di kabupaten sambas 3 paket	3	paket	-	-	-	150,503,475.00	99%	149,632,249.00
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sambas 100%	100	Persen	1,948,612,472.00	-	-	81,545,874.00	100%	81,376,372.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 unit	1	unit	1,027,890,648.00	1	Unit	13,655,483.00	100%	13,652,135.00
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia 2000 lembar	1926	dokumen	458,870,754.00	2,000	dokumen	31,429,809.00	100%	31,287,837.00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Alat Pengujian kendaraan bermotor	4	unit	461,851,070.00	6	unit	36,460,582.00	100%	36,436,400.00
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100%	100	Persen	71,297,472	-	-	121,872,868.00	92%	111,896,503.00
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	tersedianya sosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada anak sekolah	1	unit	71,297,472	-	Laporan	121,872,868.00	92%	111,896,503.00

		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan 82%	100	Persen	6,356,619,374.00	-	-	3,046,439,480.00	64%	1,942,483,104.00
		Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau di Wilayah Kabupaten Sambas 100%	100	Persen	6,356,619,374.00	-	-	3,046,439,480.00	64%	1,942,483,104.00
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pembangunan dermaga yang terbangun selama satu tahun	25	unit	4,046,237,922.00	25	unit	2,378,308,850.00	66%	1,557,854,850.00
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pembangunan dermaga yang terbangun selama satu tahun	9	unit	1,200,945,178.00	9	Unit	528,276,328.00	46%	245,228,252.00
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	terpenuhinya posko angkutan lebaran khusus dipelabuhan/dermaga penyebrangan	1	kegiatan	1,109,436,274	1	kegiatan	139,854,302.00	100%	139,400,002.00

Telah dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran pada kegiatan akibat adanya penyesuaian kebutuhan operasional tahun berjalan, perubahan dan pergeseran anggaran ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar lebih efektif dan efisien sesuai prioritas program kerja

2.2 Analisis Kinerja Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disajikan pada Tabel II.2, sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi, yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta regulasi yang memadai	Jumlah pembangunan halte bus selama satu tahun	100%	100%	100%
		Jumlah pembangunan dermaga yang terbangun selama satu tahun	100%	108%	108%
		Jumlah pengadaan marka jalan dan marka parkir di Kabupaten Sambas	100%	100%	100%
		Jumlah Penerangan Jalan Umum yang terasang di Kabupaten Sambas	100%	100%	100%

Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TINGKAT CAPAIAN
Meningkatnya ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat.	Rasio tersedianya dermaga / stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	348	377	108%

Berdasarkan tabel II.3 terkait pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang merupakan menjadi Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Sasaran **Rasio tersedianya dermaga/shelter untuk melayani aksesibilitas orang dan barang** pada tahun 2024 mencapai 108%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 348 unit dengan realisasi sebanyak 377 unit. Peningkatan ini menunjukkan adanya kelebihan realisasi sebanyak 29 unit dibandingkan target awal. Capaian yang melampaui target disebabkan oleh adanya optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana perhubungan di berbagai wilayah, serta dukungan efisiensi anggaran yang memungkinkan penambahan unit di luar perencanaan awal. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat di daerah tersebut.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah:

- a. Terbatasnya SDM Aparatur dan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi dan memahami regulasi di Bidang perhubungan.
- b. Belum terkoneksi sarana transportasi umum dari daerah perbatasan ke ibukota Kabupaten.
- c. Belum optimalnya upaya-upaya penegakkan hukum terhadap aturan-aturan di bidang Perhubungan sebagai akibat dari tidak adanya PPNS

- d. Rendahnya kinerja pelayanan karena terbatasnya sarana prasarana pendukung aparatur serta kurangnya jumlah pegawai.
- e. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
- f. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
- g. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Sambas seperti marka, rambu, PJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan / vandalism.
- h. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun factor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- i. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
- j. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun factor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

k. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Untuk tercapainya tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang dituangkan melalui program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.

Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

- **Kekuatan** (Strengths) :

- a) Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas;
- b) Tersedianya sumber daya alam yang potensial;
- c) Adanyasemangat dan komitmen untuk membangun masyarakat;
- d) Tersedianya tupoksi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan;
- e) Komitmen Pimpinan Daerah;
- f) Tingginya keinginan masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tead.

- **Kelemahan** (Weakness) :

- a) Belum tersedianya pengelolaan data yang valid dan akurat;
- b) Kurangnya SDM bidang perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas;
- c) Sarana dan prasarana belum memadai;
- d) Keterbatasan anggaran.

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang** (Opportunity):

- a) Geografis Kabupaten Sambas yang berada di perbatasan sehingga menjadi lokasi prioritas pembangunan infrastruktur;
- b) Adanya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2019;
- c) Adanya dukungan kebijakan Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
- d) Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas dialiri oleh sungai.
- e) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan beengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- **Tantangan** (Threath)

- a) Kondisi ekonomi yang fluktuatif
- b) Besarnya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum
- c) Rendahnya kapasitas SDM

d) Tingginya Tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	URUSAN PERHUBUNGAN					URUSAN PERHUBUNGAN					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	5.491.963.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	6.457.770.902	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100%	42.436.000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			100%	146.176.001	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	10.609.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	45.054.523	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	100%	10.609.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	100%	28.284.627	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	100%	10.609.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	100%	37.928.257	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	10.609.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	100%	34.908.594	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			100%	2.270.326.000	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			100%	2.629.559.683	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.983.883.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.386.323.172	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	275.834.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	213.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10.609.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	30.036.511	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			100%	103.968.200	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			100%	126.582.238	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%	103.968.200	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100%	126.582.238	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			100%	53.045.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			100%	17.530.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	53.045.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	17.530.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			100%	1.154.954.700	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			100%	339.988.365	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	6.365.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	20.439.364	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	28.644.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	20.765.095	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	10.609.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	10.808.607	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	100%	58.849.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	100%	55.193.899	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	58.849.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	51.167.007	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sambas	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	21.218.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sambas	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	24.180.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	933.592.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	168.243.000	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	986.637.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	99.855.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	148.526.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	323.574.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	99.855.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	392.533.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	1.831.491.245	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	10.609.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	7.308.125	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	190.962.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	187.766.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	190.962.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1.636.416.520	

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	477.455.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	1.238.083.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	21.218.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	112.924.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	249.311.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	552.304.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	21.218.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	12.410.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	26.522.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	556.175.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	159.185.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	4.270.000	
	PENATAAN ORGANISASI			100%	10.609.000	PENATAAN ORGANISASI			100%	36.453.180	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		10.609.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		36.453.180	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			100%	30.939.915.587	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			100%	30.554.584.629	
	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA				816.893.000	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA				78.127.717	

	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	816.893.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	78.127.717	
	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA				28.743.236.597	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA				28.059.958.785	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	28.637.146.597	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	23.962.636.663	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Sambas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Teelihara	100%	106.090.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Sambas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Teelihara	100%	4.097.322.122	
	PENGLOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C				297.428.315	PENGLOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C				736.190.000	
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Sambas	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	100%	297.428.315	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Sambas	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	100%	736.190.000	
	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR				518.475.000	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR				150.503.475	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	518.475.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	150.503.475	
	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR				149.336.000	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR				81.545.874	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	654.575.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	13.655.483	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	100%	42.436.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	100%	31.429.809	

			Berkala Kendaraan Bermotor					Berkala Kendaraan Bermotor			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Teelihara	100%	106.090.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Teelihara	100%	36.460.582	
	PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA				318.270.000	PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA				1.019.604.475	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	100%	106.090.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	100%	815.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	212.180.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	204.604.475	
	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ				96.276.675	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ				121.872.868	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	96.276.675	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	121.872.868	
	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH				1.633.786.000	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH				306.781.435	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.633.786.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sambas	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	306.781.435	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN			100%	10.768.135.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN			100%	3.046.439.480	

PEMBANGUNAN DAN PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU				100%	10.768.135.000	PEMBANGUNAN DAN PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU			100%	3.046.439.480	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	100%	5.502.398.164	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	100%	2.378.308.850	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	100%	5.000.511.836	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	100%	528.276.328	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	100%	265.225.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	100%	139.854.302	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan untuk program dan kegiatan masyarakat maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen rekayasa lalu lintas;
2. Tersangnya fasilitas keselamatan LLAJ yang memenuhi standar;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan;
4. Peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan manajemen keselamatan transportasi (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi, peningkatan fasilitas keselamatan transportasi).

Tabel II. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan Bus untuk Angkutan Wisata	1	Paket	Desa Temajuk Kec. Paloh	<i>dibutuhkan dalam rangka mendukung pembukaan Pos Lintas Batas dan promosi wisata</i>
2		Pengadaan Bus untuk Angkutan Wisata	1	Paket	Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar	<i>dibutuhkan dalam rangka mendukung transportasi di PLBN Aruk dan promosi wisata</i>
3		Pengadaan Bus untuk Angkutan Sekolah	1	Paket	Desa Penjajap Kec. Pemangkat	<i>dibutuhkan dalam rangka mendukung transportasi pada terminal terintegrasi (Dermaga Penajap dan Terminal Tipe C Pemangkat serta fasilitas Siswa/Siswa dari Kecamatan Jawai Selatan yang bersekolah di Kecamatan Pemangkat)</i>
4		Pengadaan Bus untuk Angkutan Wisata/Sekolah	1	Paket	Desa Jelu Air Kec. Jawai Selatan	<i>dibutuhkan dalam rangka mendukung transportasi pada terminal terintegrasi (Dermaga Sungai Batang dan Objek Wisata Bahari di Kecamatan Jawai Selatan)</i>
		Pengadaan Bus untuk Angkutan Sekolah	1	Paket	Kec.Sambas	<i>Dibutuhkan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi angkutan sekolah di wilayah Kecamatan Sambas</i>
		Pengadaan Perlengkapan Alat Keselamatan (Rambu)	1	Paket	Kec.Sambas, Kec.Teluk Keramat, Kec.Galing, Kec.Sajingan Besar, dan Kec.Paloh	<i>dibutuhkan karena sering terjadi kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa</i>

		Pengadaan Rambu Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1	Paket	Kec.Sambas	<i>dibutuhkan karena untuk memberikan rasa aman kepada pelajar</i>
		Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	1	Paket	Kec.Sambas, Kec.Teluk Keramat, Kec.Galing, Kec.Sajingan Besar, dan Kec.Paloh	<i>dibutuhkan karena sering terjadi kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa</i>
		Pengadaan Road Barrier	50	Unit	Dinas Perhubungan Kab. Sambas	<i>dibutuhkan dalam rangka rekayasa Lalu Lintas</i>
		Pengadaan Traffic Light/CTTV	1	Paket	Desa Makrampai Kec. Tebas	<i>dibutuhkan karena sering terjadi kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa</i>
		Pembangunan terminal Type C galing	1	Paket	Desa Galing Kec. Galing	<i>dibutuhkan sebagai terminal penyangga PLBN Aruk</i>
		Pembangunan Rest area/shelter barang /orang	1	Paket	Desa Temajuk Kec. Paloh	<i>dibutuhkan sebagai pendukung PLB Temajuk</i>
		Pengadaan <i>Water Barrier</i>	100	Buah	Dinas Perhubungan Kab. Sambas	<i>dibutuhkan dalam rangka rekayasa Lalu Lintas</i>
5	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rehabilitasi Dermaga Rakyat Penjajap	1	Paket	Desa Penjajap Kec. Pemangkat	<i>Dibutuhkan karenan kondisi dermaga sudah rusak dan sering banjir</i>
6		Rehabilitasi Dermaga Rakyat Sungai batang	1	Paket	Desa Jelu Air Kec.Jawai Selatan	<i>Dibutuhkan karenan kondisi dermaga sudah rusak dan sering banjir</i>
7		Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Cermai	1	Paket	Desa Sebusubus Kec. Paloh	<i>Dibutuhkan karenan kondisi Pelabuhan sudah rusak terutama di sisi darat dan merupakan Pelabuhan penghubung daerah Perbatasan Negara</i>
8		Rahabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sumpit	1	Paket	Desa Sebusubus Kec. Paloh	<i>Dibutuhkan karenan kondisi Pelabuhan sudah rusak terutama di sisi darat dan merupakan Pelabuhan penghubung daerah Perbatasan Negara</i>

9		Pengadaan Bus Air (Wisata)	1	Unit	Desa Dalam Kaum Kec. Sambas	<i>dibutuhkan untuk mendukung Wisata Sungai di daerah Water Front Istana Kesultanan Sambas menuju beberapa tempat lainnya seperti Kampung tenun di Desa Sumber Harapan, Gunung Senujuh, Makan Keramat Bantilan di Sajad dan Daerah Penghasil Kerajinan Rotan di Sejangkung</i>
10		Pengadaan Bus Air (Sekolah)	1	Unit	Desa Jawai Laut Kec. Jawai Selatan	<i>dibutuhkan untuk mendukung anak-anak sekolah yang berasal dari Dusun Kalang Bahu Desa Jawai Laut yang setiap hari melewati muara laut untuk sekolah di Kecamatan Pemangkat</i>
11		Pengadaan Speed Patroli	1	Unit	Dinas Perhubungan Kab. Sambas	<i>dibutuhkan mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas adalah Sungai dan banyaknya aktifitas angkutan penumpang dan barang yang melalui jalur sungai</i>
		Pengadaan Rambu sungai	1	Paket	Sungai Sambas Besar	<i>mulai dari wilayah Kec. Pemangkat, Semparuk, Tebas, Sebawi, Sambas, Teluk Keramat, Sejangkung dan Sajad</i>
		Pengadaan Rambu sungai	1	Paket	Sungai Sambas kecil	<i>mulai dari wilayah Kec. Sejangkung, Sajad dan Sambas</i>
		Pengadaan Rambu sungai	1	Paket	Sungai Bantan	<i>mulai dari wilayah Kec. Teluk Keramat dan Galing</i>
		Pembangunan/Rehab stegher/dermaga Camar Bulan	1	Paket	Desa Temajuk Kec. Paloh	<i>dibutuhkan karena dermaga yang ada sudah rusak berat dan ambruk dan tentunya akan difungsikan sebagaqi pendukung daya tarik wisata di Temajuk</i>
		Pengadaan Life Jacket	400	Buah	Dinas Perhubungan Kab. Sambas	<i>sebagai alat keselamatan angkutan sungai, mengingat Kabupaten Sambas banyak terdapat angkutan sungai yang belum menyiapkan alat keselamatan</i>

12		Pengadaan <i>Life Buoy</i>	200	Buah	Dinas Perhubungan Kab. Sambas	<i>sebagai alat keselamatan angkutan sungai, mengingat Kabupaten Sambas banyak terdapat angkutan sungai yang belum menyiapkan alat keselamatan</i>
----	--	----------------------------	-----	------	-------------------------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (JPN) Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi INDONESIA EMAS 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sasaran Utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (JPN) Tahun 2025-2045 adalah:

1. Sasaran Visi 1 Pendapatan per kapita setara Negara Maju;
2. Sasaran Visi 2 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Sasaran Visi 3 Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat;
4. Sasaran Visi 4 Daya saing sumber daya manusia meningkat.

Delapan Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (JPN) Tahun 2025-2045 adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berada di masa transisi penyusunan JMD tahun 2025-2030, namun pada Rencana Kerja tahun 2026, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sudah mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tertuang dalam JMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2030 yaitu sebagai berikut:

Visi : “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Misi :

1. Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan.
2. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z),

dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil.

4. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.

6. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Untuk periode tahun 2025-2030 Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 4 (empat) yaitu **Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah.**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk tahun 2025-2030 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam JMD Kabupaten Sambas 2025-2030 yang disusun sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian misi dan ke 4 (empat) Kabupaten Sambas tahun 2025-2030 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) program Perangkat Daerah, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, dan 78 (Tujuh Puluh Delapan) Sub Kegiatan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

Program Ini Bertujuan Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Perkantoran, Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan Pencapaian Kinerja, Keuangan, dan Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan dan sub-kegiatan meliputi:

2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4.4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pengadaan Mebel
 - 6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Penataan Organisasi
 - 9.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 9.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Ini Bertujuan Meningkatkan Efektivitas Cakupan Keandalan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dengan kegiatan dan sub-kegiatan meliputi :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 1.3 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - 3.1 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - 3.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5.2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5.3 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 5.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5.5 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5.6 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 6.2 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
 - 6.3 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - 6.4 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6.5 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 6.6 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 7.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 7.2 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
- 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 8.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 9.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10.1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Ini Bertujuan Meningkatkan meningkatkan persentase ketersediaan prasarana perhubungan dengan kegiatan dan sub-kegiatan meliputi:

1. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

3.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

- 3.2 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
- 3.3 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
- 3.4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau
dan Penyeberangan

Tabel III. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Target / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							2026		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah										
	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan									
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100		7.230.585.974.36		7.491.697.924.63	
	2.15.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	7	145.000.000.00		7	150.236.260.65
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	N/A	3.275.585.974.35		N/A	3.393.874.405.51
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	5	110.000.000.00		5	113.972.335.66
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	3	30.000.000.00		3	31.083.364.27
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	9	280.000.000.00		9	290.111.399.87
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	7	400.000.000.00		7	414.444.856.96

2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11	1.200.000.000.00	11	1.243.334.570.87
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3	270.000.000.00	3	279.750.278.45
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	%	100	24	1.500.000.000.00	24	1.554.168.213.59
2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Penataan Organisasi	%	100	2	20.000.000.00	2	20.722.242.85
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	%	100		36.887.208.240.00		38.212.895.571.00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	100	3	700.000.000.00	3	725.278.499.67
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Teenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	100	N/A	31.387.208.240.00	N/A	32.520.667.573.19
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan jalan tipe C	%	100	5	850.000.000.00	5	874.306.535.66
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100	1	100.000.000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	100	11	850.000.000.00	11	880.695.321.03
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	9	2.150.000.000.00	9	2.227.641.106.14

2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100	2	100.000.000.00	2	103.611.214.24
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tersedianya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	1	100.000.000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	500.000.000.00	2	518.056.071.20
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	150.000.000.00	2	155.416.821.36
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	%	100		2.551.049.346.94		2.643.173.204.20
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100	1	101.049.347.00	1	121.000.000.00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	300.000.000.00	2	323.173.204
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100	21	2.150.000.000.00	21	2.000.000.000.00

	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Meningkatnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	%	100		100.000.000.00		110.000.000.00
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Tersedianya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	%	100	1	100.000.000.00		110.000.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak teisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

Tabel IV. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026

Target / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							2026		2027	
							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah										
	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan									
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100	7.230.585.974.36		7.491.697.924.63	
	2.15.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100	7	145.000.000.00	7	150.236.260.65
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20.722.242.85
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	41.444.485.70
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15.541.682.14
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15.541.682.14
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15.541.682.14

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25.902.803.56
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15.541.682.14
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	N/A	3.275.585.974.35	N/A	3.393.874.405.51
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2,965,585,974.35	38	2,965,585,974.35	39	3.072.679.641.37
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	259.028.035.60
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20.722.242.85
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10.361.121.42

2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	5	11000.00	5	113.972.335.66
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20.722.242.85
2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	62.166.728.54
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	3	3000.00	3	31.083.364.27
2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	9	28000.00	9	290.111.399.87

2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	207.222.428.48
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	51.805.607.12
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	7	40000.00	7	414.444.856.96
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	82.888.971.39
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	82.888.971.39
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42

2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	207.222.428.48
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11		11	-
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	500,000,000.00	3	500,000,000.00	3	518.056.071.20
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	103.611.214.24
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	500,000,000.00	2	500,000,000.00	2	518.056.071.20
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3		3	-
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	259.028.035.60
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	%	100	24	1.50000.00	24	1.554.168.213.59

	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	259.028.035.60
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	300,000,000.00	10	300,000,000.00	10	310.833.642.72
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50,000,000.00	8	50,000,000.00	8	51.805.607.12
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	725.278.499.67
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	207.222.428.48
	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Penataan Organisasi	%	100	2	2000.00	2	20.722.242.85
	2.15.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
	2.15.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10.361.121.42
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	%	100	36.887.208.240.00		38.212.895.571.00	

2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	100	3	70000.00	3	725.278.499.67
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	518.056.071.20
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Teenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	100	N/A	31.387.208.240.00	N/A	32.520.667.573.19
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	27,387,208,240.00	N/A	27,387,208,240.00	N/A	28.376.2193.63
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Teelihara	Unit	4,000,000,000.00	N/A	4,000,000,000.00	N/A	4.144.448.569.56
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan jalan tipe C	%	100	5	850.000.000.00	5	874.306.535.66
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	600,000,000.00	3	600,000,000.00	3	615.278.500.06
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan teelihara	Unit	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	259.028.035.60

2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100	1	100.000.000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	100	11	850.000.000.00	11	880.695.321.03
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	400,000,000.00	1	400,000,000.00	1	414.444.856.96
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Teelihara	Unit	200,000,000.00	6	200,000,000.00	6	207.222.428.48
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12

2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	9	2.150.000.000.00	9	2.227.641.106.14
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	350,000,000.00	1	350,000,000.00	1	362.639.249.84
2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	207.222.428.48
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	155.416.821.36
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	1,300,000,000.00	3	1,300,000,000.00	3	1.346.945.785.11
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100	2	100.000.000.00	2	103.611.214.24
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	51.805.607.12

2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tersedianya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	1	100.000.000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	500.000.000.00	2	518.056.071.20
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	500,000,000.00	2	500,000,000.00	2	518.056.071.20
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	150.000.000.00	2	155.416.821.36
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	103.611.214.24
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000.000.00	1	50,000.000.00	1	51.805.607.12

	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut		100		2.551.049.346.94		2.643.173.204.20
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100	1	101.049.347	1	120.000.000
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	101.049.346.94	1	101.049.346.94	1	120,000,000
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2	300.000.000.00	2	323.173.204

2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	100.000.000	1	100.000.000	1	103.173.204.20
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100	21	2.150.000.000.00	21	2.000.000.000.00
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Teelihara	Unit	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	750,000,000	10	750,000,000	10	800,000,000

	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai. Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai. Danau dan Penyeberangan	Laporan	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Meningkatnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)				100,000,000		110,000,000
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Tersedianya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	%	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000
	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000

4.2 Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari:

1. APBD Kab. Sambas;
2. Pendapatan Asli Daerah Kab. Sambas;
3. APBD Provinsi Kalimantan Barat;
4. APBN, dan;
5. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).

BAB V

PENUTUP

Dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas telah disusun dan dialokasikan baik program, kegiatan maupun alokasi dananya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2030. sehingga usulan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan serta peruntukannya dalam rangka pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan. untuk itu dari beberapa usulan yang tersusun dalam rencana kerja ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. karena berhubungan dengan aktifitas sehari-hari. seperti penyediaan dermaga sungai yang dimanfaatkan untuk menaikan dan menurunkan penumpang. bongkar muat barang hasil pertanian masyarakat. dan keperluan untuk turun naik anak-anak sekolah. kemudian pengadaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. sungai dan penyeberangan untuk kelancaran arus lalu lintas sehingga dapat berjalan dengan lancar. aman. tertib dan nyaman.

Melalui Rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini diharapkan bahwa tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatnya pelayanan dalam bidang perhubungan dapat terwujud. Guna mencapai tujuan tersebut maka sasaran kerja Dinas Perhubungan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). dan berkurangnya titik kemacetan atau hambatan lalu lintas
- b. Meningkatnya jumlah titik PJU (Penerangan Jalan Umum) yang berfungsi dengan baik. dan meningkatnya pelayanan PJU (Penerangan Jalan Umum). serta berkurangnya DRK (Daerah Rawan Kecelakaan).
- c. Meningkatnya kondisi dermaga dalam keadaan laik operasi. meningkatnya aksesibilitas transportasi air bagi Masyarakat. serta meningkatnya pelayanan keselamatan pelabuhan/dermaga.

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas Perhubungan mampu menjembatani pembangunan di bidang perhubungan dan tersedianya SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMBAS**



JALIL MUHAMMAD. S.H. M.H
NIP. 19661120 199302 1 002